

UTS MATA KULIAH ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

NASKAH KEBIJAKAN (*POLICY PAPER*)

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
OLEH DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Disusun Oleh:

DEWI LILIANI 2226061012



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung yang memiliki potensi wisata alam yang sangat menarik. Namun, pengelolaan pariwisata di Lampung Barat masih belum optimal. Masalah-masalah seperti minimnya infrastruktur yang memadai, minimnya promosi dan pemasaran pariwisata, kurangnya pengelolaan sampah dan sanitasi yang baik, serta minimnya pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata masih menjadi kendala yang menghambat perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Akibatnya, potensi wisata yang dimiliki Lampung Barat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pariwisata masih belum menjadi sektor yang mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata di Lampung Barat agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang beragam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Selain itu juga kaya akan seni budaya daerah, adat istiadat, peninggalan sejarah dan keindahan alam yang memiliki potensial untuk dapat dikembangkan dengan baik agar dapat membantu mengembangkan pembangunan daerah itu sendiri.

Pembangunan daerah menjadi salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan upaya berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan untuk mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjut hal tersebut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pariwisata adalah salah satu yang dapat dikembangkan agar dapat meningkatkan pembangunan daerah . Dalam hal itu pemerintah terus berusaha dalam mengembangkan sektor pariwisata dalam meningkatkan penerimaan devisa, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengenalkan kebudayaan. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan bagian terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah. Keberhasilan dalam usaha pengembangan objek wisata ditentukan pada peran serta komitmen Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi wisata dengan berbagai pesona yang indah. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) potensi wisata kabupaten Lampung Barat berjumlah 77 destinasi wisata yang terdiri dari 14 objek Wisata Religi, 6 objek Wisata Budaya, 4 objek Wisata Danau, 23 objek Wisata Alam, 18 objek Wisata Sejarah, 5 objek Wisata Agro, 3 objek Wisata Buatan, 5 objek Wisata Cagar Alam.

Sebagai salah satu daerah yang menjadi destinasi para wisatawan, pemerintah Lampung Barat terus berupaya melakukan pengembangan objek wisata. Hal ini tertuang dalam Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah Lampung Barat menjadi daerah tujuan wisata berbasis kearifan lokal yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah dan pengaturan yang lebih terorganisir berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu antara lain penyediaan fasilitas, pelayanan dan bidang promosi.

Keadaan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Lampung Barat dalam rangka pengembangan maupun peningkatan pengelolaan destinasi wisata salah satunya adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata telah mengadakan pelatihan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan wisata di Kabupaten Lampung Barat, namun tidak ada tindak lanjut dari peserta alumni peserta pelatihan tersebut, dan kemudian tidak ada kegiatan dalam tindakan-tindakan kepariwisataan.

Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki juga tidak terawat dengan baik, seperti minimnya transportasi, akses menuju destinasi masih rusak, fasilitas objek wisata yang tidak terawat dan minimnya atraksi yang terdapat di objek wisata sehingga hal ini menjadikan kurangnya daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

Pariwisata tidak akan berkembang jika orang lain enggan untuk berkunjung karena tidak adanya informasi pariwisata tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan promosi untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan obyek wisata kepada para wisatawan. Tujuan dari kegiatan promosi itu adalah untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Sehingga kemajuan teknologi digital pada saat ini berkembang dengan baik hal ini tentunya menjadikan suatu perubahan dalam mengelola informasi kepada masyarakat yang jauh lebih efektif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengelolaan informasi digital ini tidak dikelola secara aktual. Hal ini dapat kita lihat informasi melalui website yang ada. Informasi yang diberikan paling terakhir pada tahun 2020.

Berbagai upaya harus terus dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat sebagai pihak pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengembangan bidang pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut tertuang Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2016 - 2031.

Rencana Pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Lampung Barat berupa pengelolaan pembangunan usaha pariwisata, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, pengelolaan lingkungan serta Pembangunan pasar wisata masih sepenuhnya kurang memadai dan kurang efektif karena masih banyak masyarakat di daerah 4 Kabupaten Lampung Barat tidak paham mengenai ketertarikan wisata dan masih banyak masyarakat di daerah tersebut tidak memahami sepenuhnya tentang menjaga serta mengelola kelestarian lingkungan di Kabupaten Lampung Barat sedangkan pengelolaan pariwisata di Lampung Barat

sudah dicanangkan oleh pemerintahan daerah berupa peraturan kebijakan tentang pengelolaan pariwisata di daerah tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2014:4) penelitian kualitatif merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Pendekatan penelitian kualitatif ialah penelitian memahami fenomena mengenai apa yang dinilai berdasarkan subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Dengan cara deskriptif berupa kata-kata dan bahasa., pada suatu lingkup khusus menggunakan beberapa metode alamiah. Penelitian kualitatif mampu menghasilkan hasil penelitian berupa penjabaran yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang bisa diamati dalam suatu lingkup tertentu yang dilihat dari sudut pandang yang komprehensif (Moleong, 2014).

III. PEMBAHASAN

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan salah satu perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Barat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata, berkewajiban untuk melaksanakan pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas lain yang serahkan oleh Bupati. Serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup kepemudaan dan olahraga dengan laporan secara berkala.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Kabupaten Lampung Barat, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki tugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah tanggung jawab Bupati.

Pemerintah daerah memiliki peran dalam pengelolaan pariwisata sebagai berikut:

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Masyarakat, swasta, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Pemerintah. Pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. Dinamisator, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. (Pitana, 2009).

Sebagai wilayah dengan potensi alam yang sangat kaya, Lampung Barat memiliki banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Namun, untuk dapat memanfaatkan potensi pariwisata ini secara optimal, dibutuhkan pengelolaan yang baik dan terencana. Dalam analisis pengelolaan pariwisata di Lampung Barat, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pemetaan Potensi Wisata

Pemetaan potensi wisata perlu dilakukan dengan cermat dan terperinci. Hal ini penting agar dapat diketahui apa saja objek wisata yang ada, berapa jumlah wisatawan yang berkunjung, serta apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi untuk

mengembangkan objek wisata tersebut. Dengan pemetaan yang baik, pemerintah dan pihak terkait dapat merencanakan pengembangan wisata yang tepat sasaran.

2. Pengembangan Infrastruktur wisata

Infrastruktur wisata yang baik menjadi faktor penting untuk menarik wisatawan berkunjung ke Lampung Barat. Hal ini mencakup aksesibilitas menuju objek wisata, seperti jalan raya yang baik, transportasi umum yang memadai, serta akses ke fasilitas pendukung lainnya, seperti hotel, restoran, dan toko suvenir.

3. Promosi Wisata

Promosi wisata yang baik dan efektif dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung Barat. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, iklan, event, dan lain-lain. Promosi yang baik juga harus menysasar target pasar yang tepat dan menyajikan informasi yang jelas dan menarik tentang objek wisata yang ada.

4. Konservasi Alam

Lampung Barat memiliki banyak objek wisata yang berbasis alam, seperti gunung, pantai, dan taman nasional. Oleh karena itu, konservasi alam menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kelestarian objek wisata tersebut. Pemerintah dan pihak terkait harus melakukan upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari pariwisata, seperti kerusakan lingkungan, penangkapan ikan secara berlebihan, dan lain-lain.

5. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat lokal juga merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata. Masyarakat lokal dapat menjadi bagian dari industri pariwisata, seperti dengan membuka usaha homestay, menjual suvenir, atau menjadi pemandu wisata. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Kebijakan pengelolaan objek pariwisata di Lampung Barat telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Pariwisata No. 10 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pariwisata dan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2016 - 2031.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat beberapa fokus utama dalam pengelolaan objek pariwisata di Lampung Barat. Pertama, peningkatan infrastruktur pariwisata seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum seperti toilet dan tempat parkir. Kedua, pengembangan program promosi pariwisata yang efektif, seperti pameran pariwisata, festival budaya, dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Ketiga, pengembangan produk pariwisata yang beragam dan menarik, seperti pengembangan agrowisata, budaya lokal, dan olahraga air.

Namun, meskipun telah ada kebijakan yang diatur, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan objek pariwisata di Lampung Barat. Salah satunya adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan pariwisata. Selain itu, masih terdapat kendala dalam pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur pariwisata yang masih kurang memadai, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pariwisata.

Dalam hal ini, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan pariwisata di Lampung Barat. Dalam pengelolaan pariwisata, perlu diperhatikan keberlangsungan lingkungan dan budaya lokal, serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan pengelolaan yang baik, objek wisata di Lampung Barat dapat menjadi destinasi wisata yang menarik dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Amalia, Nikita. Kusumawati, Andriani. Dan Hakim, Luchman. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Warga di Desa Tulungrejo Kota Batu*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 61. No. 3. Hlm. 48 – 56.
- Angriani, Selly. 2019. *Segmentasi Pengunjung Objek Wisata Pulau Cinta Teluk Jering Kabupaten Kampar*. JOM FISIP: Pekanbaru.
- Hermawan, Hary. 2016. *Dampak Perkembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jurnal Pariwisata, Vol. III No. 2. Hlm. 105–117.
- HS, Binarendyah Rawitri. Pramono, Joko. Dan Haryanto, Aris Tri. 2022. *Analisis Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Administrasi Publik. Universits Slamet Riyadi Surakarta. Vol. 11. No.02. Hlm. 159-170.
- N. Erna Marlia Susfenti. 2016. *“Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism-Cbt) Di Desa Sukajadi Kecamatan Carita”*. Jurnal. IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten.
- Primadany, Sefira Reylita. dkk. 2013. *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*. JAP Universitas Brawijaya: Malang.
- Rizky, Sri Mutiara. 2017. *Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Pesona Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis*. JOM FISIP Universitas Riau: Pekanbaru, Vol. 04. No.02. Hlm 1-12.
- Rohayati, Wahyu dan Sumenati, Desi. 2019. *Analisis Pengelolaan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin Tahun 2018*. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Vol. 8, No. 01.
- Sudarmayasa, I Wayan dan Nala, I Wayan Lanang. 2019. *Dampak Keberadaan Sektor Pariwisata Terhadap peningkatan Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat Kampung Tenun Samarinda di Kota Samarinda Kalimantan Timur*. JUMPA Vol. 05. No. 02. Hlm. 283–295.
- Yatmaja, Panji try. 2019. *Efektivitas pemberdayaan Masyarakat Oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan.

Buku

Arida, I Nyoman Sukma. 2017. *Ekowisata Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*. Cakra Press: Bali.

Arida, I Nyoman Sukma, Sunarta. 2017. *Priwisata Berkelanjutan*. Cakra Press: Bali.

Ardika, I Gede. 2018. *Kepariwisata Berkelanjutan Rintis Jalan Lewat Komunitas*. Kompas Media Nusantara: Jakarta.

Moleong, Lexy. J. 2014. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pitana, I., & Diarta, I.. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi

Suhardono, Edy. 2014. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2016 - 2031*.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Lampung Barat*.